



KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Investasi swasta dan investasi pemerintah di Kabupaten Buleleng memberikan pengaruh secara bersama - sama terhadap kesempatan kerja, investasi swasta dan investasi pemerintah juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengangguran. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang "conducive", antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2)

Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antar daerah.

Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif.

Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001:76) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang dengan masif. Pertama, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga member peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut maka dapat dipahami bahwa penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal serta menjalankan operasional usahanya di daerah.

Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Melalui regulasi, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Kehadiran regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor

swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Buleleng perlu memiliki regulasi yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di wilayahnya. Secara geografis Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang memiliki letak strategis karena memiliki topografi perbukitan/pegunungan, dataran sedang dan rendah rendah serta garis pantai yang membentang dari ujung timur Pulau Bali sampai dengan ujung barat Pulau Bali. Secara administratif Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 129 Desa. Kabupaten Buleleng memiliki luas 136.588 Ha. Sekitar seperempat dari luas kabupaten merupakan daerah dataran rendah, sisanya merupakan daerah dataran sedang, tinggi dan pegunungan. Dengan jumlah penduduk mencapai 814.356 jiwa (data tahun 2017)

Penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga tahun 2023 jika dilihat dari NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terbi sebanyak 12.247 dengan rencana investasi sebesar Rp. 12.407.704.650.946. Kegiatan penanaman modal tidak terlepas dari kegiatan usaha baik dalam usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Berdasarkan realisasi investasi Kabupaten Buleleng triwulan III tahun 2022 dengan nilai realisasi investasi Rp. 513.459.150.066.

Berdasarkan data tersebut maka diperlukan strategi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Buleleng. Salah satu upaya mendasar yang perlu diwujudkan adalah penyusunan regulasi yang secara khusus dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Buleleng. Keberadaan regulasi tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, untuk memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan kajian teknis rancangan peraturan daerah ini akan melakukan identifikasi permasalahan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?
3. Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ?
4. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
5. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah **menentukan arahan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng..**

D. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Buleleng;
2. Identifikasi Investasi di kabupaten Buleleng;
3. Identifikasi Kebijakan Insentif Terhadap Penanaman Modal; dan
4. Penentuan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.